e – ISSN : 2528 - 2069

OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI: STUDI TENTANG MODEL PEMBANGUNAN DI KARAWANG

Maulana Rifai
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Email: maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Paska jatuhnya rezim Soeharto dan bergulirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, model pembangunan yang tadinya terpusat kemudian mengalami pergeseran menjadi terdesentralisasi. Gagasan otonomi untuk memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam proses pembangunan dirinya termanifestasi dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU no 32 tahun 2004. Di saat bersamaan globalisasi membawa potensi manfaat dan kerugian bagi sebuah pembangunan kota yang tidak bisa mengoptimalkan peluang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis-kritis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada. Temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pembangunan di Kabupaten Karawang masih belum sesuai dengan konsep ruang publik Habermas dan adanya globalisasi perlu disikapi dengan persiapan sumber daya manusia yang kompetitif agar bisa bersaing dan menjadi ujung tombak pembangunan.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Globalisasi, Model Pembangunan di Karawang

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan gagasan yang muncul paska jatuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Sentralisme kekuasaan yang menjadi wajah dan watak jalannya roda pemerintahan yang berkuasa mengakibatkan gagasan ini mengemuka pada masa paska reformasi. Diawali dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 dimana kewenangan itu akhirnya didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronase apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintahan pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.

Lalu kemudian pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU yang lahir sebelumnya yang terkait dengan otonomi daerah untuk lebih memperjelas dan mempertegas relasi pusat dan daerah. Seperti diketahui bersama, di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berkenaan antara lain dengan konflik pertahanan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perijinan investasi, perusakan lingkungan, alokasi anggaran, penetapan prioritas pembangunan dan sebagainya.

Sehingga dalam rangka penerapan otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah untuk berinisiasi dan berkreasi demi daerahnya. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya, antara lain; ekonomi, politik, dan sosial budaya.[1] Di bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah secara demokratis, yang memungkinkan berlangsungnya pemerintahan responsif terhadap kepentingan mastarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang dipikul, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik serta administrasi yang kompetitif juga mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu sisi harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain sisi menjadi peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai gagasan pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dan terakhir, di bidang sosial-budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang bersamaan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Otonomi daerah juga sangat terkait erat dengan globalisasi yang telah muncul pada dekade 70-an dan 80-an di Amerika Serikat. Artinya, globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (*state borderless*) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara. Hal ini memunculkan persoalan serius yang bisa menjadi ganjalan bagi desentralisasi dan otonomi daerah karena ia berlangsung dalam sebuah era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.

Dalam situasi semacam itu, otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan. Daerah-daerah yang mampu bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang tidak efisien akan 'ditelan' oleh globalisasi

[1] M. Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas.* Jakarta: AIPI. Hal. 18

melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, kekalahan di tingkat nasional akan ditransformasikan dengan cepat ke daerah.[2]

Daerah Karawang yang memiliki posisi strategis dengan Jakarta dan Bandung masing-masing sebagai ibukota negara dan ibukota provinsi Jawa Barat, tentu memiliki nilai tawar tersendiri dibanding dengan daerah lain. Ditambah pula dengan pesatnya pembangunan di sektor industri, sektor perumahan, serta investasi lainnya menjadikan Karawang menjadi salah satu daerah yang menjadi lahan investasi terbesar di Jawa Barat. Bahkan baru-baru ini, untuk menopang hal tersebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani prasasti penegrian Universitas Singaperbangsa Karawang. Karena kemajuan dan pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa didukung oleh sektor pendidikan.

Amartya Sen menyebutkan, kebebasan adalah inti pembangunan dan karena itu masyarakat harus dibebaskan dari sumber ketidak-bebasan itu.[3] Sumber ketidakbebasan itu adalah kemiskinan (yang dapat menyebabkan orang tidak mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnya peluang ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luar rumah) dan pemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik (misalnya pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan intoleransi atau represi oleh negara. Dengan demikian, pembangunan manusia sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak dan tidak mungkin ditunda-tunda.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan tidak selalu berbanding lurus dengan harapan dan angan-angan bagi sebagian besar masyarakat Karawang secara umum. Pengangguran, kemiskinan, serta keterbelakangan yang berimplikasi terhadap tingginya angka kriminalitas masih terus membayangi masyarakat Karawang. Sejatinya, sebuah pembangunan itu bisa dapat mensejahterkan masyarakat umum, akses terhadap pendidikan jauh lebih mudah, kemudian tenaga kerja lokal akan lebih mudah terserap untuk mendapatkan kerja pada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Karawang.

Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak jelasnya arah pembangunan di Karawang yang tidak sesuai dengan visinya, yakni *"Terwujudnya Masyarakat Karawang Yang Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Pertanian dan Industri Yang Selaras Dan Seimbang Berdasarkan Iman dan Takwa"*. Pernyataan visi tersebut mengandung dua makna yaitu Karawang sejahtera yang berbasiskan pada sektor pertanian dan industri. Karawang sejahtera mengandung pengertian perwujudan kualitas kehidupan masyarakat yang layak ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan infrastruktur dasar dalam lingkungan sosial yang harmonis, berbudaya dan berakhlak secara berkelanjutan dalam tatanan sistem pemerintahan daerah dengan prinsip *good governance*.

Kalimat berbasis pertanian dan industri mengandung pengertian bahwa pembangunan kedua sektor dimaksud merupakan sarana menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kedua sektor tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, sektor pertanian dalam arti luas dengan prioritas sesuai potensi riil yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perikanan tangkap dan darat. Potensi sektor pertanian, sangat didukung dengan faktor lahan pertanian irigasi tekhnis seluas 102.567 Ha yang terdiri dari

[2] Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan.* Yogyakarta: CAPS (Centre for Academic Publishing Service). Hal. 286.
[3] Amartya Sen. 2001. *Government as Freedom*. New York: Anchor Book

luas areal pertanian tanaman pangan seluas 89.614 Ha, luas areal perikanan 13.021 Ha dengan serapan tenaga kerja mencapai 26,3 persen. Ditinjau dari sisi produksi, komoditas padi menyumbang 21 persen stok pangan Jawa Barat dan 11 persen stok pangan nasional, sedangkan komoditas perikanan menyumbang konsumsi rumah tangga sebesar 21,5 Kg per kapita per tahun. Kondisi tersebut dinilai telah mencerminkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan dan menjamin ketahanan pangan.[4]

Kedua, industri yang secara potensi eksisting dapat dibedakan menjadi Industri yang berbasis pada potensi SDA daerah sehingga diharapkan memiliki struktur industri yang kokoh dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian dan Industri yang memanfaatkan keuntungan faktor lokasi yang saling bersinergi dalam suatu rantai nilai industri meliputi industri inti, industri pendukung dan industri terkait. Berdasarkan data, Kabupaten Karawang memiliki zona dan kawasan industri yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang seluas 11.920,1 Ha, terdiri dari Kawasan Industri seluas 5.837,5 Ha, Kota Industri 1.000 Ha, Zona Industri seluas 5.117,6 Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 19,8 persen dan kontribusi terhadap PDRB telah mencapai lebih dari 40 persen.[5] *Namun demikian, kondisi faktual yang terjadi di lapangan adalah lahan produktif pertanian justru semakin menyusut sebagai imbas dari menjamurnya perumahan yang menggerus lahan pertanian serta bertambahnya pendatang yang memang berprofesi di sektor industri. Hal ini mengakibatkan ketimpangan terjadi dengan program pembangunan yang memang dicita-citakan dalam visinya.* Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana model pembangunan di Karawang terkait dengan kebijakan otonomi daerah dan arus globalisasi? Serta bagaimana implikasi otonomi daerah dan globalisasi terhadap pembangunan di Karawang?

B. TEORI DAN KERANGKA ANALISIS

Kohesifitas antara otonomi daerah dan globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi proses dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, tak terkecuali Karawang. Otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada dibawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan (Piliang, 2003). *Free will* inilah yang mendorong manusia untuk mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara maksimal. Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul.

Otonomi individu menjadi modal dasar bagi terbentuknya otonomi pada level yang lebih tinggi. Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan

[4] Laporan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011.
[5] Laporan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011.

mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antardaerah. Untuk itu, otonomi daerah perlu diperkuat dengan peraturan yang jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu.

Ciri-ciri hakikat otonomi yang independen yaitu *legal self-sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the conditition of living under one's own laws* (Sarundajang, 1999). Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan pada aspirasi daripada kondisi. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya.

Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Otonomi daerah berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam kerangka negara federal.

Dalam kerangka ini, daerah memiliki hak dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan di daerahnya dengan keunikannya masing-masing. Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetisi, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan dorongan dan *support* agar daerah tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum.

Secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan *social capital* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan pranata yang telah *internalized*, mekanisme penyelesaian mereka pandang lebih efektif, efisien dan adil.

Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik. Baik Undang-Undang No. 22/1999 maupun amandemennya UU No. 32/2004 tentang Perintahan Daerah menganut pemikiran seperti itu. Bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah dan optimalisasi

peran serta masyarakat dalam pembangunan, merupakan trimatra yang mendasari lahirnya UU No. 22/1999 dan amandemennya yaitu UU No. 32/2004.[6]

Gagasan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat, masih jauh dari harapan, jika memperhatikan kinerja birokrasi selama beberapa tahun terakhir. Selain format ideal bagi keberadaan birokrasi di berbagai level pemerintahan belum menemukan bentuknya, tarik menarik antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten dan dengan pusat, masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Selain itu kecenderungan semua level pemerintahan untuk menjalankan semua fungsi pelayanan juga masih dominan, sehingga kecenderungan masyarakat sebagai obyek penerima pelayanan juga masih menonjol.

Sementara itu, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk–bentuk interaksi yang lain sehingga batas–batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Menurut Keohane dan Nye globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah.[7] Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.

Sejarah globalisasi telah dimulai sejak ekspedisi Magellan, bahkan mungkin lebih dari itu. Namun sebagai sebuah diskursus dan praktik politik, globalisasi nyaring terdengar sejak 1980an dan terus semakin kuat pasca perang dingin. Menurut sebagian penulis, dunia sekarang jauh lebih terintegrasi, terhubung satu sama lain, dan juga saling tergantung (Keohane dan Nye, 2006). Proses globalisasi yang berlangsung cepat sebagai akibat murahnya biaya komunikasi dan transformasi yang memungkinkan mobilitas penduduk dan komunikasi lintas batas negara. Dengan demikian, dunia terintegrasi secara global dalam berbagai bidang baik sosial, politik, dan lebih-lebih dalam ekonomi, maupun lingkungan hidup.

Dalam bukunya yang berjudul Etika Pembangunan, Budi Winarno banyak menampilkan contoh model-model pembangunan dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri misalnya, ia mengambil sampel dari Kabupaten Bantul, Jawa Tengah dan Gorontalo. Sedangkan dari luar negeri ia mengambil contoh kasus di kota Porto Alegre, Brazil dan negara Uruguay. Tentu model-model tadi tidak akan sepenuhnya berhasil jika diterapkan di Karawang, namun demikian tidak ada salahnya jika Karawang mau belajar dari kota, provinsi, dan negara dari dalam dan luar negeri yang dianggap sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Jadi kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah konsep ruang publik yang merupakan adopsi dari keberhasilan model-model pembangunan diatas.

[6] Pheni Chalid. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan. Hal. 28

[7] Robert Keohane dan Joseph S. Nye. 2006. Kekuasaan dan Interdependensi: Transisi dalam Politik Dunia. Boston : Little Brown Publisher

Habermas pernah menggagas mengenai *public sphere* sebagai model kebijakan pembangunan alternatif (*non-mainstream*) dengan contoh yang digulirkan di Porto Alegre, Brazil. Ia mengatakan:

> *The public sphere as communication structure rooted in the lifeworld through the sociational network of civil society. The public shere is a warning system with sensors that, though unspecialized, are sensitive throughout society. From the perspective of democratic theory, the public sphere must, in addition, amplify the pressure of problems, that is, not only detect and identify problems but also convincingly and influentially thematize them, furnish them with possible solutions, and dramatize them in such a way that they are taken up and dealt with by parliamentary complexes. The public sphere can best be described as a network for communicating information and points of view (i.e. opinions expressing affirmative or negative attitudes), the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions* (Habermas, 1996: 359-360).

Hal tersebut menjelaskan maksud Habermas tentang *public sphere* dengan berbagai dimensi yang berasosiasi dengan jaringan masyarakat sipil sebagai *warning system* tidak hanya mendeteksi permasalahan melalui teknis dialogis (komunikasi). Partisipasi aktif masyarakat melalui jalur dialog merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan *public sphere* sebagai solusi persoalan dan masalah. Komunikasi publik dalam *public sphere* memiliki makna *reproducing culture and keeping traditions alive, social integration or the coordination of the plans of different actors in social interaction, socialization, or cultural interpretation of needs* (Habermas, 2007:25). Untuk lebih memperjelas, diagram berikut menjelaskan bagaimana pola dan relasi antara negara/pemerintah, masyarakat dan ruang publik yang dimaksud.

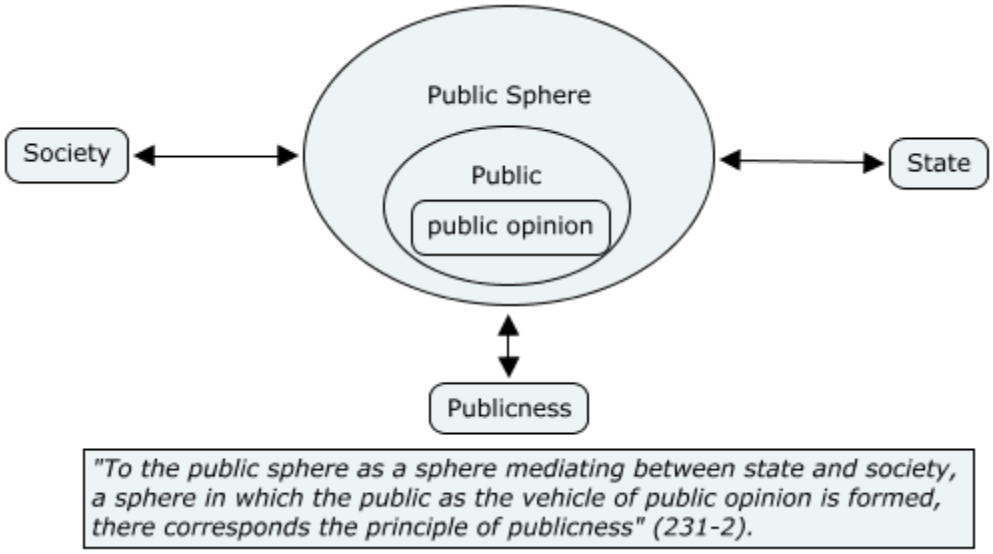

Sebagai proses demokrasi yang menghadirkan *public sphere* merupakan suatu proses dari *deliberative democracy*. Untuk berjalannya *deliberative democracy* demi sebuah tujuan

dan tatanan legitimasi yang baik, Habermas berpendapat bahwa hak-hak politik harus dijamin secara hukum dalam partisipasi deliberatif untuk proses penentuan pendapat dan kebebasan berbicara untuk mengkritik dengan kesetaraan dan kebebasan berbicara merupakan cara bekerjanya prinsip diskursus. Penciptaan legitimasi hukum melalui deliberatif politik menggambarkan sebuah prosedur *problem-solving*, mengontrol konflik dan upaya untuk mencapai kepentingan bersama, berorientasi kepada berbagai konsepsi bersama tentang kehidupan yang baik di mana dinilai oleh standar moral dan etika. Masyarakat secara umum dilihat sebagai *problem-solving system* (Habermas, 1996: 127 dan 139).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kritis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada secara utuh, sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif. Dalam analisa kualitatif, terdapat empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan[8]:

a. Display data merupakan presentasi sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalu kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengupas mengenai model pembangunan yang berdasar pada teori Habermas dan telah banyak diaplikasikan secara empiris dan berhasil di beberapa negara, provinsi, bahkan kabupaten. Untuk Kabupaten Karawang sendiri, peneliti telah melakukan observasi lapangan yakni ke Bappeda Karawang bagian Tata Ruang, Anggota DPRD Karawang dan masyarakat. Dari observasi lapangan tersebut peneliti banyak menemukan temuan-temuan yang nanti akan dibahas secara lebih komprehensif dan mendalam pada bagian ini.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa proses pembangunan di masa otonomi daerah dan globalisasi ini memang sebuah keniscayaan bagi suatu wilayah untuk bisa mengambil peluang tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga suatu wilayah bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan dari adanya otonomi dan globalisasi tersebut. Bukan malah sebaliknya yang bisa mengakibatkan angka kemiskinan bertambah, tingginya pengangguran, tingkat pendidikan yang minor dan implikasi-implikasi negatif lainnya.

1. Model Pembangunan di Karawang

[8] M. Manulang. 2004. *Pedoman Teknis Penelitian.* Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal.35

Karawang yang periode sekarang ini dipimpin oleh Cellica Nurrachdiana, menggantikan H. Ade Swara yang tersandung kasus hukum, bisa dikatakan minim dengan kebijakan yang sifatnya inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat umum di Karawang. Hal ini bisa diterjemahkan dari pernyataan salah seorang anggota DPRD yang menegaskan bahwa pembangunan di Karawang tidak jelas arah dan tujuannya, tidak sesuai dengan visi-misi, serta pembangunan yang ada banyak menguntungkan para pemilik kapital, ketimbang masyarakat lokal sebagai tuan rumah. Ditambah pula dengan bertambah banyaknya pendatang dari sektor formal maupun informal yang mengadu nasib di kota ini yang seakan tidak sesuai dengan substansi Perda Ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut juga diamini oleh seorang aparat Bappeda bagian Tata Ruang yang bernama Puguh Hariyanto yang menyatakan bahwa pemerintah, pada konteks ini (Plt.) Bupati Karawang, memang bisa dikatakan tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang sifatnya inovatif dan populis jika dikomparasi dengan pemimpin daerah lain, semisal; Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung, serta Tri Rismaharini yang memimpin Kota Surabaya. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa pemerintah tidak peduli sama sekali pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Karawang.

Ditambahkan pula bahwa mereka memimpin pembangunan wilayah dengan memiliki konsep yang sangat jelas serta yang terpenting adalah bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dan itu merupakan esensi dari pembangunan, tidak hanya yang bersifat fisik seperti infrastruktur, kebijakan yang bisa memberdayakan masyarakat, mengangkat kehidupan ekonomi ke tingkat yang lebih baik juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di masa otonomi daerah dan globalisasi yang sudah secara masif berlaku ke setiap daerah di manapun itu, tak terkecuali di Karawang.

Bicara mengenai pembangunan sebuah wilayah, tentu perlu melibatkan semua pihak, tak terkecuali masyarakat yang memang merasakan langsung dari dampak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu, peneliti juga mewawancarai elemen masyarakat untuk lebih memvalidasi data dan temuan pada penelitian ini. Salah satunya adalah tokoh agama yang bernama Ustad Anding. Beliau menuturkan mengenai pembangunan di Karawang yang belum merata dan masih berkutat di wilayah kota serta belum menyentuh wilayah perkampungan atau desa-desa di daerah pesisir. Tentu ini cukup mengkhawatirkan di tengah pendapatan daerah yang begitu besar dan belum sepenuhnya terserap dengan baik ketika bicara mengenai pemerataan pembangunan.

Sedangkan tokoh pemuda yang mewakili masyarakat menyatakan bahwa meskipun pemerintah menyediakan layanan *sms-centre* sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat untuk merespon dan melayani secara lebih baik, efektif, dan efisien. Namun itu yang terjadi hanyalah sebatas *lip-service* belaka yang tidak ada tindak lanjut kedepannya. Sehingga ketidakpuasan warga terhadap pemerintah memang dianggap wajar karena merasa diasingkan atau dianaktirikan oleh penguasa yang sedang menjabat di pemerintahan.

Otonomi daerah merupakan gagasan yang muncul paska jatuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Sentralisme kekuasaan yang menjadi wajah dan watak jalannya roda pemerintahan yang berkuasa mengakibatkan gagasan ini mengemuka pada masa paska reformasi. Diawali dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25

tahun 1999 dimana kewenangan itu akhirnya didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronase apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintahan pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.

Lalu kemudian pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU yang lahir sebelumnya yang terkait dengan otonomi daerah untuk lebih memperjelas dan mempertegas relasi pusat dan daerah. Seperti diketahui bersama, di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berkenaan antara lain dengan konflik pertahanan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perijinan investasi, perusakan lingkungan, alokasi anggaran, penetapan prioritas pembangunan dan sebagainya.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah untuk berinisiasi dan berkreasi demi daearahnya. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya, antara lain; ekonomi, politik, dan sosial budaya (Ryaas Rasyid, 2002:18) Di bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah secara demokratis, yang memungkinkan berlangsungnya pemerintahan responsif terhadap kepentingan mastarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

Otonomi daerah juga sangat terkait erat dengan globalisasi yang telah muncul pada dekade 70-an dan 80-an di Amerika Serikat. Artinya, globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali (*state borderless*) namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara. Hal ini memunculkan persoalan serius yang bisa menjadi ganjalan bagi desentralisasi dan otonomi daerah karena ia berlangsung dalam sebuah era globalisasi yang serba cepat, terbuka dan luas.

Dalam situasi semacam itu, otonomi yang dimiliki oleh daerah akan sangat menentukan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan. Daerah-daerah yang mampu bekerja secara efisien akan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang tidak efisien akan ‘ditelan’ oleh globalisasi melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, kekalahan di tingkat nasional akan ditransformasikan dengan cepat ke daerah.

Maka dari itu, analisa yang bisa diambil oleh peneliti adalah betapa pembangunan di Karawang masih jauh dari konsep yang digagas oleh Habermas di mana ruang publik masih sangat minim, sehingga aspirasi dari *grass-roots* belum sepenuhnya terserap. Menilik pengalaman dari Provinsi Gorontalo di bawah Fadel Muhammad, kemudian Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Idham Samawi, betapa mereka benar-benar bisa membangun wilayahnya masing-masing dengan memberdayakan masyarakat bawah, seperti; para petani, nelayan, dan mereka yang bergerak di sektor perkebunan. Sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian yang kedua adalah tidak sejalannya visi-misi Kabupaten Karawang dengan program pembangunan. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan konsep dari arah pembangunan yang tumpang tindih. Maka tak ayal, ketika pembangunan itu terjadi justru banyak menguntungkan para pemilik modal yang menginvestasikan sahamnya di Karawang, dan implikasinya tidak terjadi *trickle down effect* yang sejatinya menyentuh masyarakat Karawang itu sendiri. Sehingga kebijakan otonomi daerah dan globalisasi ini benar-benar dimanfaatkan peluangnya oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat banyak (*public goods*).

2. Implikasi Otonomi Daerah dan Globalisasi Bagi Pembangunan di Karawang

Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Namun demikian, otonomi yang seyogyanya menjadi peluang atau potensi suatu wilayah untuk bisa lebih maju, berkembang maksimal dan sekaligus menikmati hasil kekayaan alamnya. Dalam konteks ini, dapat member nilai lebih (*value-added*) pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peneliti mencoba mengulas implikasi dari adanya kebijakan otonomi daerah dan globalisasi yang terjadi di Karawang. Wilayah ini yang dulunya dikenal dengan lumbung padi di tingkat nasional memang bukan rahasia umum. Namun ada yang sedikit berbeda dimana kini Karawang menuju era industrialisasi sebagai konsekuensi logis dari sebuah kota yang sedang tumbuh dan berkembang mencari jati dirinya. Industrialisasi menuju kota metropolitan dengan meninggalkan sejarah awalnya yang bertumpu pada masyarakat petani dan nelayan. Ataukah industrialisasi menuju kota metropolitan tanpa meninggalkan budaya usaha pertanian dan perikanan. Alternatif yang ketiga, industrialisasi menuju kota metropolitan berjalan beriringan.

Masyarakat Karawang dengan kultur petani dan nelayan saat ini sedang menuju kearah industrialisasi manufaktur sebagai implikasi dari adanya otonomi daerah dan globalisasi. Namun sayangnya pekerja lokal asal Karawang mulai tergeser dengan tenaga kerja pendatang. Sebagai pembanding, China dengan sistem komunis jatuh pada pilihan membangun negaranya berawal dari daerah pertanian. Teknologi industrinya pun berkiblat pada sektor pertanian dan perikanan, lalu bergeser ke industri manufaktur tingkat menengah dan modern. China saat ini sebagai negara pengumpul devisa terbesar di dunia tanpa meninggalkan budaya usaha masyarakatnya sebagai kaum pedagang. Bukan sekedar predikat, masyarakat China kini memiliki ketahanan mental budaya, ketahanan pangan dan modal yang kuat, meninggalkan Jepang dan Amerika serta nega-negara Eropa lainnya.

Realitas ini sekedar menunjukan gambaran industrialisasi berbasis pertanian atau perikanan dapat menciptakan dirinya menjadi sebuah negara megapolitan. Persoalan menjadi berbeda ketika melihat industrialisasi di Karawang terkesan belum berbasis pada pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Dampak yang mungkin terjadi adalah Karawang di bagian utara sebagai lumbung padi nasional bakal terancam. Dan akibat yang paling parah adalah petani mati di lumbung padinya sendiri. Nelayan mati di lumbung ikannya sendiri. Keduanya meratapi nasibnya namun tidak mampu berbuat banyak akibat

arah pembangunan yang tidak tepat. Para petani dan nelayan hanya melihat dengan tatapan mata kosong serta mengerutkan dahinya ketika melihat aksi ratusan atau bahkan ribuan buruh yang bersuka cita menyambut terkabulnya Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sebagai kaum marjinal, petani dan nelayan hanya mampu berharap namun tidak bisa berbuat banyak ketika sejumlah lahan pertanian berubah menjadi kawasan pabrik, perumahan dan gedung-gedung perkantoran. Itu terjadi karena kiblat pembangunan pemerintah Kabupaten Karawang tidak bertumpu pada industri pertanian dan nelayan. Itu sebabnya, tidak ada pabrik hasil produksi pertanian yang dibangun secara masif di pedesaan. Demikian pula, tidak ada pabrik hasil perikanan yang dibangun secara masif di pesisir pantai utara Karawang. Bukan hanya lahan pertanian dan perikanan yang menyempit tetapi lahan kerja juga sulit dan rata-rata pendapatan petani dan nelayan juga minim. Ini akibat minimnya pembangunan di pedesaan. Padahal, hasil produksi pertanian dan perikanan di pedesaan adalah sumber makanan bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Namun nasib petani dan nelayan terpinggirkan.

Sungguh ironis, manakala melihat kebijakan pembangunan di Karawang ini. Pada tahun 2012 yang lalu misalnya, realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karawang mencapai 10,574 triliun, nilai investasi ini sangat besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purwakarta pada tahun yang sama hanya sebesar 658 miliar. Nilai investasi di Karawang bersumber dari 25 proyek investasi dan boleh jadi 80 persennya tidak ditanam pada sektor industri pertanian dan perikanan. Dari sudut lapangan kerja sudah jelas lebih terbuka luas di perkotaan ketimbang di perdesaan.

Dengan nilai investasi sebesar itu, Karawang yang berbasis industri memang menjadi sebuah magnet besar dalam tahap menuju kota metropolitan. Angka UMK yang sangat besar mengindikasikan bahwa pergeseran secara cepat dan besar-besaran dari sektor pertanian dan perikanan menuju kearah industrialisasi. Investasi PMA dan PMDN yang tertanam di Karawang misalnya, tidak mencerminkan kebijakan pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif melawan derasnya tenaga kerja pendatang baik dari luar kota maupun luar negeri. Terlebih Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) akan sudah berlaku sejak awal tahun 2016.

Dalam analisis data kependudukan, tingginya angka pengangguran akan berbanding lurus atau sama dengan tingginya angka kemiskinan. Itu sebabnya, kebijakan industrialisasi yang dianggap mampu menyerap lapangan kerja ternyata berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Dengan kata lain, implikasi otonomi daerah dan globalisasi ini berimbas pada kebijakan pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan pembangunan di bagian utara Karawang akan berdampak pada kemiskinan penduduk.

Implikasi yang lain menurut salah satu tokoh masyarakat adalah modernisasi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Hal itu mengakibatkan masyarakat desa, terutama yang berusia produktif, enggan untuk bertani atau menjadi nelayan. Mereka lebih memilih menjadi karyawan pabrik yang bergaji besar ketimbang jadi petani di sawah. Tentu hal ini perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah kabupaten maupun

masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga, industrialisasi juga perlu kesiapan dan keterampilan masyarakatnya dalam memfungsikan alih teknologi sebelum menuju era industrialisasi modern.

Pergeseran arah pembangunan sesungguhnya sudah menampakkan gejalanya sejak tahun 1980-an. Ada percepatan pembangunan dari sektor pertanian di belahan utara Karawang kea rah industrialisasi di sebelah selatan. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir saja, pemerintah Kabupaten Karawang menyulap tanah-tanah pertanian yang kurang produktif menjadi kawasan industri. Hasilnya cukup spektakuler, investor asing dan dalam negeri memburu investasi melalui pembangunan pabrik dan perkantoran serta perumahan di kawasan industri. Karena jika dilihat dari potensi daerahnya, Karawang memang pantas diburu oleh para investor karena banyak memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari minyak bumi, pasir laut, batu kapur (kars) dan sebagainya.

Maka dari itu, kemajuan industrialisasi yang beriringan dengan sektor pembangunan pertanian dan perikanan menjadi suatu kebutuhan sekaligus kunci utama konsep pembangunan di Kabupaten Karawang. Pada perkembangannya, bukan hanya pemerintah daerah tetapi implikasi pembangunan tentu harus memiliki rasa keadilan dan mampu menciptakan kemandirian hidup bagi masyarakatnya.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengulas mengenai model pembangunan di Karawang di era otonomi daerah dan globalisasi yang sudah menggejala di belahan bumi manapun, tak terkecuali di wilayah ini. Pergeseran pembangunan terjadi dari yang asalnya adalah masyarakat agraris atau pertanian beralih ke industrial. Tentu hal ini memiliki implikasi positif dan negatif bagi masyarakat secara umum di Karawang. Namun demikian, peneliti mencoba menyimpulkan apa yang menjadi temuan di lapangan dan telah dibahas pada bab sebelumnya.

Model pembangunan di Karawang masih jauh dari konsep yang digagas oleh Habermas di mana ruang publik masih sangat minim, sehingga aspirasi dari *grass-roots* belum sepenuhnya terserap. Tidak sejalannya visi-misi Kabupaten Karawang dengan program pembangunan. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan konsep dari arah pembangunan yang tumpang tindih. Maka tak ayal, ketika pembangunan itu terjadi justru banyak menguntungkan para pemilik modal yang menginvestasikan sahamnya di Karawang, dengan model pembangunan yang industrial. Dan implikasinya tidak terjadi *trickle down effect* yang sejatinya menyentuh masyarakat Karawang itu sendiri. Sehingga kebijakan otonomi daerah dan globalisasi ini benar-benar dimanfaatkan peluangnya oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat banyak (*public goods*).

Kemajuan industrialisasi yang terjadi di Karawang adalah sebuah keniscayaan. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga, industrialisasi juga perlu kesiapan dan keterampilan masyarakatnya dalam memfungsikan alih teknologi sebelum menuju era industrialisasi modern. Pada perkembangannya, bukan hanya pemerintah daerah tetapi implikasi pembangunan tentu harus memiliki rasa keadilan dan mampu menciptakan kemandirian hidup bagi masyarakatnya. Khususnya dengan memberdayakan masyarakat kelas bawah, seperti; para

petani, nelayan, dan mereka yang bergerak di sektor perkebunan. Sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Baylis, J., and Smith, S., 2001. The Globalization of World Politics:An Introduction to International Relaations. New York: Oxford University Press.

Budiman, Arief. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005. Jakarta: Pustaka Alfabet.

Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Jakarta: Kemitraan Press.

Chomsky, Noam. 2005. Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tantangan Global. Jakarta: Profetik.

Hardiman, F., Budi. 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Habermas, Juergen, 2012. Teori Tindakan Komunikatif: Kritik Atas Rasional Fungsionalis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Haris, Syamsuddin. 2002. Otonomi Daerah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah. Jurnal Ilmu Politik: AIPI.

Keohane, R. dan Nye, J.S. 2006. Kekuasaan dan Interdependensi: Transisi dalam Politik Dunia. Boston : Little Brown Publisher

Manulang, M. 2004. Pedoman Teknis Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muhammad, Fadel. 2008. Reinventing Local Government:Pengalaman dari Daerah. Jakarta: Elex Media Computindo.

Raharjo, Dawam. 2005. “Menuju Demokrasi Ekonomi”. Dalam Hadi Soesastro, dkk. (eds.) Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Rasyid, M. Ryaas. 2002. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas. Jakarta: AIPI.

Salim, Emil. 2010. Ratusan Bangsa Merusak Bumi. Jakarta: Kompas.

Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Anchor Books.

Soros, George. 2007. Open Society: Reforming Global Capitalism. Terjemahan Sri Koesdiyantinah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiono, Muhadi. 1999. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2013. Etika Pembangunan. Yogyakarta: CAPS (Centre for Academic Publishing Service).